

## ABSTRAK

Kabut asap lintas batas merupakan sebuah isu yang dapat menimbulkan dampak signifikan bagi stabilitas keamanan sebuah negara, seperti yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Singapura, sebagai negara yang terdampak kabut asap lintas batas berupaya untuk menindak tegas permasalahan ini bersama negara-negara keanggotaan ASEAN melalui sebuah perjanjian *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP) sebagai landasan hukum dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi AATHP yang dinilai belum efektif dalam menangani permasalahan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara dan menganalisa upaya yang dilakukan Singapura dalam mengefektifkan implementasi AATHP pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang dilengkapi dengan kerangka teori efektivitas rezim dan politik luar negeri. Berdasarkan analisis menggunakan konsep dan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan implementasi AATHP dipengaruhi oleh tiga komponen, yakni *output*, *outcome*, dan *impact*. Upaya yang dilakukan Singapura dalam hal ini didasari oleh kondisi domestiknya yang mendorong Singapura untuk menjalankan politik luar negeri bersama dengan negara-negara ASEAN melalui AATHP. Adapun upaya tersebut berupa pelaksanaan sekuritisasi guna mendesak negara pendonor asap untuk melakukan peratifikasian, inisiasi badan khusus yang menanggulangi kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas, pemberian bantuan kepada negara pendonor asap, dan pembentukan kebijakan hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas sesuai dengan arahan yang dituliskan dalam perjanjian AATHP.

Kata kunci: Singapura, AATHP, ASEAN, Efektivitas Rezim, Politik Luar Negeri, Kabut Asap Lintas Batas.

## **ABSTRACT**

Transboundary haze is an issue that can have a significant impact on the security stability of a country, as is the case in the Southeast Asia region. Singapore, as a country affected by transboundary haze, is trying to take firm action against this problem together with ASEAN member countries through an ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) as a legal basis for dealing with this problem. This research aims to discuss the implementation of AATHP which is considered ineffective in dealing with the problem of transboundary haze in Southeast Asia and to analyze the efforts made by Singapore to make AATHP implementation more effective in 2013-2015. This research uses a qualitative research method that is descriptive analysis which is equipped with a theoretical framework of regime effectiveness and foreign policy. Based on the analysis using the concepts and theories above, it can be concluded that the ineffectiveness of AATHP implementation is influenced by three components, namely output, outcome and impact. The efforts made by Singapore in this regard are based on its domestic conditions which encourage Singapore to carry out joint foreign policy with ASEAN countries through AATHP. These efforts take the form of implementing securitization to urge haze-donor countries to ratify, initiating special agencies to tackle forest fires and trans-border haze, providing assistance to haze-donor countries, and establishing legal policies to take firm action against parties who contribute to forest fires and land and transboundary haze in accordance with the directions written in the AATHP agreement.

**Keywords:** Singapore, AATHP, ASEAN, Regime Effectiveness, Foreign Policy, Transboundary Haze.